



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
  - c. bab III : rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - d. bab IV : penutup.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
  - (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
  - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Dinas Sosial;

- j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  - k. Dinas Pangan;
  - l. Dinas Lingkungan Hidup;
  - m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
  - o. Dinas Perhubungan;
  - p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
  - q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
  - u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
  - v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  - y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - bb. Kecamatan Weru;
  - cc. Kecamatan Bulu;
  - dd. Kecamatan Tawang Sari;
  - ee. Kecamatan Sukoharjo;
  - ff. Kecamatan Nguter;
  - gg. Kecamatan Bendosari;
  - hh. Kecamatan Polokarto;
  - ii. Kecamatan Mojolaban;
  - jj. Kecamatan Grogol;
  - kk. Kecamatan Baki;
  - ll. Kecamatan Gatak; dan
  - mm. Kecamatan Kartasura.
- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
SUKOHARJO TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;



30. Kecamatan Tawang Sari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI



**RENCANA KERJA (RENJA)  
PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

**DINAS PPKB dan P3A  
KABUPATEN SUKOHARJO**

Disusun oleh :

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PPKB dan P3A)  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PPKB dan PPPA sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PPKB dan PPPA	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PPKB dan PPPA	34
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	<b>37</b>
3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PPKB dan PPPA Tahun 2023	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sukoharjo	90
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>92</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa : gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun, yang

menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dibuat guna penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang diperlukan dalam rangka pencapaian kinerja, berdasarkan realisasi aktivitas, perkembangan kondisi dan progres dalam pelaksanaan di lapangan selama Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2023. Perubahan Renja juga dalam rangka efektifitas pemanfaatan anggaran yang tersedia pada kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja.

Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo mengakomodir dinamika dalam pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari sampai dengan Juni 2023 dan adanya perubahan regulasi yang berpengaruh baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan maupun kegiatan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023 adalah :

- a. Landasan Idiil: Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional: UUD 1945.

- c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
- i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025;

- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

### **1.3 Maksud dan tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini adalah sebagai dasar penyusunan program, kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Sukoharjo di tahun 2023 melalui perencanaan kinerja tahunan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini adalah :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan rencana kerja yang telah disusun satu tahun sebelumnya terhadap pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan yang telah berjalan dan proyeksi selanjutnya untuk satu tahun kedepan;
- b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 terhadap Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo dan RKPD Perubahan Tahun 2023.

- c. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi perencanaan program dan kegiatan pembangunan antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat
- d. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi karena permasalahan aktual yang dihadapi pada tahun berjalan, adanya perubahan kebijakan baik di daerah maupun dari tingkat pusat

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 disusun berikut :

##### **Bab I. PENDAHULUAN**

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Perubahan Renja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

##### **Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PPKB dan PPPA sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

##### **Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan.

##### **Bab IV. PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PPKB dan PPPA sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Dalam rangka penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PPKB dan PPPA Tahun 2022 dan Perkiraan pencapaian target Tahun 2023 (Tahun berjalan ) sampai dengan Triwulan II. Adapun capaian kinerja dimaksud seperti pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2023 s.d Triwulan II**  
**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Sukoharjo**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 s.d Triwulan II		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
2	3	4	6	7	8 = (7/6)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Prosentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	51,16%	51,16%
<b><i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat	100%	100%	86,28%	86,28%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	2 Dokumen	66,40%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	0
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	50,95%	50,95%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menrima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	21 Orang/Bulan	-	0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	66,67%

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	50 Paket	50 Paket	-	0
Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Dokumen	-	0
<b>Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	67,94%	67,94%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	4 Paket	44,44%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	7 Paket	46,67%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	30 Paket	75%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	4 Paket	80%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan	-	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	88 Laporan	44 Laporan	50%

<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	38,62%	38,62%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	2 Laporan	2 Laporan	-	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	-	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	-	0
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	40,31%	40,31%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 unit	-	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 unit	-	0

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	132 Unit	132 unit	20 Unit	15,15%
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	20%	35%	-	0
<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Program Kerja Pengarusutamaan Gender	60%	70%	-	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Regulasi	1 Dokumen	-	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 OPD	40 OPD	-	0
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 orang	-	0
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial</b>	Prosentasi Keterlibatan Perempuan di Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi pada	50%	60%	-	0

<b>dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kabupaten/Kota</b>	Organisasi Kemasyarakatan				
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Organisasi	24 Organisasi	-	0
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	60%	70%	-	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	28 Lembaga	28 Lembaga	-	0
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	15 Orang	15 Orang	-	0

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Prosentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,017	0,015	-	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100%
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Kasus kekerasan terhadap Perempuan yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	50 Orang	10 Orang	20%



Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	50 Layanan	5 Layanan	10%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,04	0,05	-	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	80 Orang	72 Orang	-	0
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	40 Kali	50 kali	50 Kali	100%

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Prosentase Perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi	0,15	0,16	-	0
<b><i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	Prosentase Pemanfaatan Hasil Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	0,09	0,10	-	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	-	0
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0

<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Lembaga yang memanfaatkan PUSPAGA	15%	15%	-	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	24 Lembaga	24 Lembaga	-	0
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	80 Orang	-	0
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Kunjungan ke PUSPAGA	50%	60%	-	0

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	1 Layanan	-	0
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Prosentase Data dan Informasi PPPA yang tersedia	60%	70%	-	0
<b><i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	Jumlah laporan data dan informasi PPPA	2 laporan	2 laporan	-	0
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Skor Kabupaten Layak Anak	675 Skor	700 Skor	620 Skor	88,57%
<b><i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i></b>	Prosentase Keterlibatan Stakeholder dalam menuju Kabupaten Layak Anak	75%	80%	80%	100%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	70 Organisasi	70 Organisasi	40 Organisasi	57,14%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	80%	85%	85%	100%
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	100 Orang	60 Orang	60%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	0

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	0
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
<b><i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	Prosentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	62%	52%	-	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	-	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%

<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota</b>	Cakupan tersediannya layanan anak yang memerlukan perlindungan	62%	65%	-	0
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	-	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Layanan	40 Layanan	-	0
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat</b>	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0

<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>					
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kbaupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Dokumen	40 Dokumen	30 Dokumen	75%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Cakupan Stakeholder yang memanfaatkan GDPK	25%	30%	-	0
<b>Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Regulasi GDPK	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0



Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	5 Dokumen	5 Dokumen	-	0
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan NonFormal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	6 Laporan	1 Laporan	-	0
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	-	0
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Laporan	2 Laporan	-	0

<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten</b>	Prosentase Efektifitas Rumah Data Kependudukan (RDK) di kampung KB	20%	30%	-	0
Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan	1 Laporan	-	0
Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	40 Dokumen	40 Dokumen	-	0
Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0
Membentuk Rumah Data Kependudukan Di KB Untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK di sektor lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	48 Unit	48 Unit	46 Unit	95,83%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	-	0
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	12 Laporan	12 Laporan	-	0

<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Cakupan Peserta KB Aktif	68,85%	63,89%	106,57%	100%
<b><i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i></b>	Prosentase peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam penggerakan KB	80%	80%	-	0
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4 Organisasi	-	0
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	10 Dokumen	10 Dokumen	-	0
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 DOkumen	1 DOkumen	-	0
Penggunaan Media Massa Cetak,	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK					
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	-	0
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	-	0
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	-	0
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Cakupan peserta KB baru	68%	69%	4%	5,79%
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	-	0

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	167 Orang	167 Orang	18 Orang	10,78%
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase PUS yang tidak terpenuhi kebutuhan alat kontrasepsinya ( <i>Unmetneed</i> )	13,3%	13,27%	20%	100%
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	-	0
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	40 Orang	40 Orang	-	0
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	68 Orang	68 Orang	-	0
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	1 Laporan	-	0
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 Unit	12 Unit	-	0
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	40 Orang	40 Orang	-	0

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	-	0
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	40 Orang	40 Orang	-	0
Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	5 Orang	5 Orang	3 Orang	60%
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Cakupan Kampung KB aktif	75%	75%	-	0
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4 Dokumen	4 Dokumen	-	0
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	167 Kampung	167 Kampung	-	0

Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS )</b>	Cakupan Kelompok Kegiatan yang aktif	74%	76%	-	0
<b><i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i></b>	Jumlah terbentuknya Poktan di masing-masing Desa/Kelurahan	20 Kel	30 Kel	-	0
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	12 kelompok	12 kelompok	12 Kelompok	100%
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40 Unit	40 Unit	-	0

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	12 Laporan	-	0
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	180 Orang	180 Orang	-	0
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	334 Orang	334 Orang	-	0
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13 Kelompok	13 Kelompok	-	0



Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	12 Laporan	12 Laporan	-	0
<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Prosentase Peran aktif Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga	75%	75%	-	0
Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	6 Organisasi	6 Organisasi	-	0

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK -R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	6 Organisasi	6 Organisasi	-	0
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12 Laporan	12 Laporan	-	0

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo

Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo selama 2 (dua) tahun terakhir dan proyeksi Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo

No	Indikator	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021			
I.	TUJUAN							
1	Indeks Pembangunan Gender IPG	96,49	96,50	96,49	96,52	96,96	-	Nilai Muncul Akhir Tahun
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,88	0,88	0,40	(0,01)	0,69	-	Nilai Muncul Akhir Tahun
II	SASARAN							
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,17	76,17	77,98	77,69	79,16	-	Nilai Muncul Akhir Tahun
4	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	1:10397	1:10397	1:10397	1:12187	1:10405	1:35536	Tercapai
5	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	1:8419	1:8419	1:8419	1:8600	1:8450	1:25788	Tercapai
6	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR )	1,89	1,88	1,89	1,78	1,81	-	Nilai Muncul Akhir Tahun
7	Angka Kelahiran	Na	5,01	Na	2,64	4,98	-	Nilai Muncul Akhir

	Remaja Umur 15-19 Tahun ( Age Spesifik Fertility Rate / ASFR )							Tahun
8	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	NA	22	NA	21	22	-	Nilai Muncul Akhir Tahun
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60,99	64	60,99	67,08	70,98	-	Dalam Proses Evaluasi Inspektorat

Dari analisis capaian kinerja dapat diketahui bahwa banyak indikator yang belum dapat dinilai karena nilai baru muncul di akhir Tahun 2023. Indikator yang sudah tercapai adalah rasio kekerasan terhadap Perempuan dan rasio kekerasan terhadap anak.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo**

Permasalahan yang dihadapi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut :

- A. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
  1. Kurangnya partisipasi perempuan dalam Pembangunan.
  2. Kurangnya sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi advokasi, fasilitasi menyusun perencanaan analisis dan manajemen PUG.
  3. Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pokja PUG.
  4. Masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
- B. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
  1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
  2. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
  3. Kurangnya peran serta stakeholder dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- C. Permasalahan terkait perlindungan anak:
  1. Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak.
  2. Kurangnya peran serta stakeholder dalam pencapaian kabupaten layak Anak (KLA).
  3. Tingginya kasus perkawinan anak.
- D. Permasalahan terkait dengan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana:
  1. Masih rendahnya Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif serta masih tingginya *unmet need*.

2. Masih rendahnya tingkat kesertaan ber KB bagi pria.
  3. Kecenderungan meningkatnya kelahiran dari wanita usia 15-19 tahun (*ASFR=Age Spesifik Fertility Rate*).
  4. Belum terwujudnya Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK).
- E. Permasalahan terkait Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
1. Kurangnya pengelolaan Tribina (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS).
  2. Belum optimalnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga.
- F. Permasalahan terkait Kesekretariatan:
1. Belum optimalnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah.

Dari permasalahan yang ada maka dirumuskan Isu-Isu Strategis yang akan ditangani berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 

Isu Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

  - a. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
  - b. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - c. Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak.
  - d. Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas Pokja PUG.
  - e. Kurangnya peran serta stakeholder dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Isu Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:
  - a. Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi.
  - b. Belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
  - c. Cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani.
  - d. Masih rendahnya Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PPKB dan PPPA Tahun 2023**

Perencanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PPKB dan PPPA setahun kedepan terdiri dari program utama dan program penunjang (rutin) sebagai berikut:

1. Program Utama:
  - a. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 550.000.000,-
  - b. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN dengan rencana anggaran Rp. 264.514.048,-
  - c. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA dengan rencana anggaran sebesar Rp.135.000.000,-
  - d. PROGRAM PENGELOLAAN SYSTEM DATA GENDER DAN ANAK dengan rencana anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
  - e. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK dengan rencana anggaran sebesar Rp. 145.000.000,-
  - f. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK dengan rencana anggaran sebesar Rp. 226.400.000,-
  - g. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK dengan rencana anggaran sebesar Rp. 471.800.000,-
  - h. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) dengan anggaran sebesar Rp. 9.435.363.000,-
  - i. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.280.880.000,-
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.075.885.380,-

Adapun secara lengkap, rencana perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**  
**TAHUN 2023**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																5,416,799,428	5,580,508,428		4,792,968,488
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																4,075,885,380	4,240,964,380		3,358,654,440
2	8	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																55,000,000	55,000,000		60,000,000
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000		

									Daerah														
2	8	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,000,000	
2	8	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	6,000,000	
2	8	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Cakupan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	6,000,000	

							nan Dokume n DPA- SKPD	Perangkat Daerah													
2	8	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pelaksana an penunjang urusan pemerinta h daerah	Jumlah Dokume n Perubah an DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n Perubah an DPA- SKPD	Cakupan koordinasi dan penyusunan dokumen perencana , penganggara n dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharj o, Bendosa ri, Jombor	100 %	100 %	1 Dok umen	1 Dok umen	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	6,000,000
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Persentase pelaksana an penunjang urusan pemerinta h daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Cakupan koordinasi dan penyusunan dokumen perencana , penganggara n dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharj o, Bendosa ri, Jombor	100 %	100 %	3 Lapo ran	3 Lapo ran	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	6,000,000

2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6,000,000
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									<b>222,273,000</b>	<b>222,918,000</b>					<b>234,000,000</b>	
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100%	100%	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	100%	100%	3,075,916,000	3,216,484,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2,607,619,000
2	8	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	266,070,000	266,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	0
2	8	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100%	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	100%	4,500,000	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100%	6,000,000

					Tahun SKPD	h daerah	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Daerah	Jombor								i Umum		daerah		
2	8	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	5,000,000	5,021,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	6,000,000
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>24,237,500</b>	<b>24,237,500</b>			<b>6,000,000</b>				
2	8	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Persentase pelaksanaan penunjang urusan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat		100 %	100 %	50 Paket	50 Paket	100 %	100 %	19,237,500	19,237,500	PEND APATAN TRANS	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 %	0

					Kelengkapannya	pemerintah daerah	Atribut Kelengkapan	Daerah									FER		daerah			
2	8	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6,000,000
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>222,273,000</b>	<b>222,918,000</b>					<b>234,000,000</b>	
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100%	100%	9 Paket	9 Paket	100%	100%	2,985,000	2,985,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	4,000,000
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100%	100%	15 Paket	15 Paket	100%	100%	30,351,000	30,901,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	26,000,000
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik	Persentase pelaksanaan penunjang	Jumlah Paket Bahan Logistik	Cakupan Administrasi Umum Perangkat	Kab. Sukoharjo, Bendosari	100%	100%	40 Paket	40 Paket	100%	100%	94,537,000	94,537,000	Dana Transfer Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan	100%	102,000,000

					Kantor	urusan	Kantor	Daerah	ri,									-Dana		pemerintah		
					urusan	pereminta	yang		Jombor									Alokasi		daerah		
					h daerah	h daerah	Disediak										Umum					
					an	an	an															
2	8	1	2.06	5	Penyediaan	Persentase	Jumlah	Cakupan	Kab.	100	100	5 Paket	5 Paket	100	100	15,000,000	15,000,000	Dana		Persentase	100 %	17,000,000
					Barang	pelaksana	Paket	Administrasi	Sukoharjo,	%	%			%	%			Transfer		pelaksanaan		
					Cetakan	an	Barang	Umum	Bendosari,								Umum		penunjang			
					dan	penunjang	Cetakan	Perangkat	Jombor								-Dana		urusan			
					Penggandaan	urusan	dan	Daerah								Alokasi		pemerintah				
					an	pereminta	Penggunaan									Umum		daerah				
					an	h daerah	yang															
					h daerah	h daerah	Disediak															
					an	an	an															
2	8	1	2.06	6	Penyediaan	Persentase	Jumlah	Cakupan	Kab.	100	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	100	4,000,000	3,480,000	Dana		Persentase	100 %	0
					Bahan	pelaksana	Dokumen	Administrasi	Sukoharjo,	%	%			%	%			Transfer		pelaksanaan		
					Bacaan	an	Bacaan	Umum	Bendosari,								Umum		penunjang			
					dan	penunjang	dan	Perangkat	Jombor								-Dana		urusan			
					Peraturan	urusan	Peraturan	Daerah								Alokasi		pemerintah				
					Perundang-undangan	pereminta	Perundang-undangan									Umum		daerah				
					h daerah	h daerah	an															
					h daerah	h daerah	Disediak															
					an	an	an															
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi	Persentase	Jumlah	Cakupan	Kab.	100	100	50 Laporan	50 Laporan	100	100	5,400,000	2,700,000	Dana		Persentase	100 %	5,000,000
					Kunjungan	pelaksana	Laporan	Administrasi	Sukoharjo,	%	%			%	%			Transfer		pelaksanaan		
					Tamu	an	Fasilitasi	Umum	Bendosari,								Umum		penunjang			
						urusan	Kunjungan	Perangkat	Jombor								-Dana		urusan			
						pereminta	Tamu	Daerah								Alokasi		pemerintah				
					h daerah	h daerah	an									Umum		daerah				
					h daerah	h daerah	Disediak															
					an	an	an															
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan	Persentase	Jumlah	Cakupan	Kab.	100	100	88 Laporan	88 Laporan	100	100	70,000,000	73,315,000	Dana		Persentase	100 %	80,000,000
					Rapat	pelaksana	Laporan	Administrasi	Sukoharjo,	%	%			%	%			Transfer		pelaksanaan		
					Koordinasi	an	Penyellen	Umum	Bendosari,								Umum		penunjang			
					dan	penunjang	garaan	Perangkat	Jombor							-Dana		urusan				
					Konsultasi	urusan	Rapat	Daerah								Alokasi		pemerintah				
						pereminta	Koordinasi									Umum		daerah				
						h daerah	si dan															

					SKPD	h daerah	Konsulta si SKPD										Umum					
2	8	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>18,990,000</b>	<b>36,640,000</b>				<b>52,000,000</b>	
2	8	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan layanan penyediaan barang perangkat daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100%	100%	6 Unit	6 Unit	100%	100%	18,990,000	36,640,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	52,000,000
2	8	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>158,900,880</b>	<b>167,663,000</b>				<b>127,035,440</b>	
2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6,000,000
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	13,434,000	7,434,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	16,000,000
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Persentase pelaksanaan penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Cakupan layanan penunjang urusan	Kab. Sukoharjo, Bendosari	100%	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%	100%	140,466,880	155,229,000	Dana Transfer Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan	100%	105,035,440



					Kantor	urusan pemerintah daerah	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	pemerintahan daerah	ri, Jombor									-Dana Alokasi Umum		pemerintah daerah			
2	8	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													<b>244,998,000</b>	<b>242,430,880</b>				<b>260,000,000</b>
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	134,998,000	168,678,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	135,000,000	
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	80,000,000	49,752,880	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	90,000,000	
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Persentase pelaksanaan penunjang urusan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	132 Unit	132 Unit	100 %	100 %	30,000,000	24,000,000	Dana Transfer Umum -Dana		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 %	35,000,000	

					Lainnya	pemerintah daerah	yang Dipelihara	Urusan Pemerintah Daerah	Jombor								Alokasi Umum		daerah		
2	8	2			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>										550,000,000	541,992,000			552,000,000		
2	8	2	2.01		<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										225,000,000	199,700,000			187,000,000		
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase perangkat daerah yang menyusun program kerja pengarusutamaan gender	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 %	70 %	25,000,000	38,790,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	35 %	50,000,000
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi PUG yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase perangkat daerah yang menyusun program kerja pengarusutamaan gender	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	1 dokumen	1 dokumen	70 %	70 %	75,000,000	53,580,000				86,000,000

2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase perangkat daerah yang menyusun program kerja pengarusutamaan gender	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	70 %	70 %	75,000,000	60,830,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	35 %	0
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengaru	Prosentase perangkat daerah yang menyusun program kerja pengarusutamaan gender	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	70 %	70 %	50,000,000	46,500,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	35 %	51,000,000







2	8	3			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>								<b>264,514,048</b>	<b>264,914,048</b>		<b>235,714,048</b>					
2	8	3	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>75,000,000</b>	<b>105,340,000</b>		<b>75,000,000</b>					
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kekerasan terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	0.02 %	0.02 %	55,000,000	85,340,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Prosentase Kekerasan terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	100 %	55,000,000
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten	Prosentase Kekerasan terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	0.02 %	0.02 %	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Prosentase Kekerasan terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	100 %	20,000,000





03				Kabupaten/Kota																	
2	8	3	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kekerasan terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	0.05 %	0.05 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Prosentase Kekerasan terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	100 %	15,000,000
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kekerasan terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapa	Prosentase lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	72 Orang	72 Orang	0.05 %	0.05 %	15,000,000	11,150,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Prosentase Kekerasan terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	100 %	15,000,000









2	8	4	2.03	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>										50,000,000	50,000,000					60,000,000	
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kunjungan ke PUSPAGA	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	0,16 %	0,16 %	1 Layanan	1 Layanan	60 %	60 %	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi	0,16 %	60,000,000
2	8	5		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>										20,000,000	28,008,000					36,000,000	
2	8	5	2.01	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										20,000,000	28,008,000					36,000,000	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase data informasi PPPA yang tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah laporan data dan informasi PPPA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 lap	2 lap	10,000,000	8,425,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase data informasi PPPA yang tersedia	70 %	21,000,000
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaat	Persentase data informasi	Jumlah Dokumen	Jumlah laporan data dan	Kab. Sukoharjo,	70 %	70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 lap	2 lap	10,000,000	19,583,000	Dana Transfer	Persentase data informasi PPPA yang	70 %	15,000,000







						Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		aan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										Umum					
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Skor Kabupaten Layak Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700 Nilai	700 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	85 %	85 %	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Skor Kabupaten Layak Anak	700 Nilai	25,000,000		
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Skor Kabupaten Layak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700 Nilai	700 Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	85 %	85 %	15,000,000	18,700,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Skor Kabupaten Layak Anak	700 Nilai	15,000,000		

					Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		n														
2	8	7			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>							226,400,000	226,400,000									245,600,000	
2	8	7	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>							100,000,000	90,840,000										130,000,000
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase pencegahan kekerasan terhadap anak	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	50 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	52 %	52 %	20,000,000	25,200,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	100 %	30,000,000		

2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kekerasan terhadap anak	Prosentase pencegahan kekerasan terhadap anak	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	480 Orang	480 Orang	52 %	52 %	80,000,000	65,640,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	100 %	100,000,000
2	8	7	2.02		<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>101,400,000</b>	<b>110,560,000</b>			<b>85,600,000</b>		
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten /Kota	Cakupan tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	65 %	65 %	Cakupan tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan	15,000,000	35,060,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	100 %	15,000,000
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi	Cakupan tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	50 Layanan	50 Layanan	65 %	65 %	61,400,000	14,600,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	100 %	40,600,000

					an Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota		Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota															
2	8	7	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	jumlah orang yang mengikut pelatihan manajemen penanganan kasusa	Cakupan tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	100 Dokumen	100 Dokumen	65 %	65 %	15,000,000	50,900,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	100 %	15,000,000
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Cakupan tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	65 %	65 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	100 %	15,000,000





					Tingkat Kabupaten/Kota		unan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota															
2	#	2	2.01	3	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Regulasi GDPK	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	30 %	30 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dok	12 Dok	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	30 %	15,000,000
2	#	2	2.01	4	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Regulasi GDPK	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	30 %	30 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dok	12 Dok	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	30 %	15,000,000
2	#	2	2.01	5	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur	Regulasi GDPK	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	30 %	30 %	5 Dokumen	5 Dokumen	12 Dok	12 Dok	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	30 %	15,000,000





2	#	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Regulasi GDPK	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	30 %	30 %	2 Laporan	2 Laporan	12 Dok	12 Dok	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	30 %	15,000,000
2	#	2	2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>351,800,000</b>	<b>351,800,000</b>				<b>479,830,000</b>
2	#	2	2.02	1	Perumusan Parameter Kependudukan	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	Prosentase efektifitas RDK di Kampung KB	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	30 %	30 %	1 Laporan	1 Laporan	30 %	30 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	30 %	15,000,000
2	#	2	2.02	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Prosentase efektifitas RDK di Kampung KB	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	30 %	30 %	40 Dokumen	40 Dokumen	30 %	30 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	30 %	15,000,000
2	#	2	2.	4	Pemetaan Kependud	Cakupan stakeholder	Jumlah Dokumen	Prosentase efektifitas	Kab. Sukoharjo	30 %	30 %	1 Dok	1 Dok	30 %	30 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transf	Cakupan stakeholder	30 %	38,830,000

			02		ukan	r yang memanfaatkan GDPK	n Pemetaan Kependudukan	RDK di Kampung KB	o, Bendosari, Jombor		umen	umen				er Umum -Dana Alokasi Umum	yang memanfaatkan GDPK				
2	#	2	2.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Prosentase efektifitas RDK di Kampung KB	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	30 %	30 %	48 Unit	48 Unit	30 %	30 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	30 %	2
2	#	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem	Prosentase efektifitas RDK di Kampung KB	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	30 %	30 %	1 Laporan	1 Laporan	30 %	30 %	74,200,000	74,200,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	30 %	150,000,000



					Stakeholders dan Mitra Kerja	tkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	kerja dalam pergerakan KB	ri, Jombor													-Dana Alokasi Umum						
2	#	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	Prosentase peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam pergerakan KB	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	10 Dokumen	10 Dokumen	80 %	80 %	35,000,000	35,000,000				Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	60,000,000		

2	#	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPBK	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Prosentase peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam pergerakan KB	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	10 Unit	10 Unit	80 %	80 %	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	20,000,000
2	#	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPBK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak	Prosentase peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam pergerakan KB	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	250,000,000	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	220,640,000

							dan Elektroni k serta Media Luar Ruang															
2	#	3	2. 01	5	Penggunaa n Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Cakupan Peserta KB Aktif	Penggun aan Media Massa Cetak, Elektroni k dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitra an Program KKBPK	Prosentase peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam penggerakan KB	Kab. Sukoharj o, Bendosa ri, Jombor	69,4 %	69,4 %	2 kali	2 kali	80 %	80 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	15,000,000
2	#	3	2. 01	6	Pelaksana an Mekanis me Operasion al Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam ) , Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Mekanis me Operasio nal Program Bangga Kencana (Pemban gungan Keluarga , Kependu dukan, dan Keluarga Berenca na) Melalui	Prosentase peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam penggerakan KB	Kab. Sukoharj o, Bendosa ri, Jombor	69,4 %	69,4 %	1 Lapo ran	1 Lapo ran	80 %	80 %	181,000,000	181,000,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	240,840,000

							Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)															
2	#	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Prosentase peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam pergerakan KB	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	1 Laporan	1 Laporan	80 %	80 %	379,577,000	379,577,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	550,000,000
2	#	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	Prosentase peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam	Kab. Sukoharjo, Bendosari,	69,4 %	69,4 %	1 Laporan	1 Laporan	80 %	80 %	305,000,000	335,000,000	Dana Transfer Umum -Dana		Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	270,000,000

							Program KKBPK	penggerakan KB	Jombor									Alokasi Umum				
2	#	3	2. 02		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>											<b>1,298,550,000</b>	<b>1,352,310,000</b>				<b>1,712,800,000</b>	
2	#	3	2. 02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Baru	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	1 Laporan	1 Laporan	69 %	69 %	319,350,000	373,110,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	310,000,000	



						(PKB/PL KB)															
2	#	3	2.02	4	Penggerak an Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan peserta KB Baru	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,4 %	69,4 %	2004 Orang	2004 Orang	69 %	69 %	979,200,000	979,200,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	1,402,800,000
2	#	3	2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>4,179,236,000</b>	<b>4,174,236,000</b>				<b>2,291,000,000</b>
2	#	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Prosentase PUS yang TIDAK terpenuhi kebutuhan alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	1 Laporan	1 Laporan	12.5 %	12.5 %	49,600,000	49,600,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	50,000,000

2	#	3	2.03	2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Prosentase PUS yang TIDAK terpenuhi kebutuhan alat Kontrasepsi (Unmetneed)	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	40 Orang	40 Orang	12.5 %	12.5 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	12,000,000
2	#	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Prosentase PUS yang TIDAK terpenuhi kebutuhan alat Kontrasepsi (Unmetneed)	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	68 Orang	68 Orang	12.5 %	12.5 %	2,424,874,000	2,424,874,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	2,100,000,000
2	#	3	2.03	4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat	Prosentase PUS yang TIDAK terpenuhi kebutuhan alat Kontrasepsi	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	1 Laporan	1 Laporan	12.5 %	12.5 %	20,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	30,000,000

					Penggunaan MKJP		dan Kegagalan Penggunaan MKJP	ya (Unmetneed)										Umum					
2	#	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Prosentase PUS yang TIDAK terpenuhi kebutuhan alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	12 Unit	12 Unit	12.5 %	12.5 %	1,602,262,000	1,602,262,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	30,000,000	
2	#	3	2.03	7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Prosentase PUS yang TIDAK terpenuhi kebutuhan alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	40 Orang	40 Orang	12.5 %	12.5 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	15,000,000	
2	#	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Prosentase PUS yang TIDAK terpenuhi kebutuhan alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	1 Laporan	1 Laporan	12.5 %	12.5 %	32,500,000	32,500,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	12,000,000	

						Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																
2	#	3	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Prosentase PUS yang TIDAK terpenuhi kebutuhan alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	40 Orang	40 Orang	12.5 %	12.5 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	12,000,000
2	#	3	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Akseptor yang Mendapatkan Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Prosentase PUS yang TIDAK terpenuhi kebutuhan alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	5 Orang	5 Orang	12.5 %	12.5 %	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	30,000,000
<b>2</b>	<b>#</b>	<b>3</b>	<b>2.04</b>		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>								<b>2,632,000,000</b>	<b>2,632,000,000</b>					<b>2,944,025,000</b>			
2	#	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi	Prosentase Kampung KB Aktif	Kab. Sukoharjo, Bendosari	69,4 %	69,4 %	4 Dokumen	4 Dokumen	75 %	75 %	24,000,000	24,000,000	Dana Transfer Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	25,000,000

					Kampung KB		Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			ri, Jombor								-Dana Alokasi Umum					
2	#	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Prosentase Kampung KB Aktif		Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	167 Kampung	167 Kampung	75 %	75 %	2,593,000,000	2,593,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	2,896,250,000
2	#	3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Prosentase Kampung KB Aktif		Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	69,4 %	69,4 %	4 Laporan	4 Laporan	75 %	75 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	69,4 %	22,775,000
<b>2</b>	<b>#</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>											<b>5,280,880,000</b>	<b>5,227,505,000</b>			<b>4,993,929,000</b>			
<b>2</b>	<b>#</b>	<b>4</b>	<b>2.</b>		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>											<b>5,205,880,000</b>	<b>5,152,505,000</b>			<b>4,888,099,000</b>			

				01																			
2	1	4	4	2.	01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Prosentase terbentuknya Poktan di masing-masing Desa/Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	76 %	76 %	12 Kelompok	12 Kelompok	30 Kali	30 Kali	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	76 %	50,000,000

2	1	4	4	2.	01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Prosentase terbentuknya Poktan di masing-masing Desa/Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	76 %	76 %	40 Unit	40 Unit	30 Kali	30 Kali	422,280,000	368,905,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	76 %	499,500,000
2	1	4	4	2.	01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Prosentase terbentuknya Poktan di masing-masing Desa/Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	76 %	76 %	12 Laporan	12 Laporan	30 Kali	30 Kali	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	76 %	50,000,000

							Keluarga /UPPKS)																	
2	1	4	4	2.01	4	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana /Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana /Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Prosentase terbentuknya Poktan di masing-masing Desa/Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	76 %	76 %	678 Orang	678 Orang	30 Kader	30 Kader	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	76 %	50,000,000	
2	1	4	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Prosentase terbentuknya Poktan di masing-masing Desa/Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	76 %	76 %	334 Orang	334 Orang	30 Kader	30 Kader	4,624,000,000	4,624,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	76 %	4,168,599,000	



					PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)		PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)															
2	1	4	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Prosentase terbentuknya Poktan di masing-masing Desa/Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	76 %	76 %	13 Kelompok	13 Kelompok	30 Kali	30 Kali	29,600,000	29,600,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	76 %	20,000,000
2	1	4	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Prosentase terbentuknya Poktan di masing-masing Desa/Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	76 %	76 %	12 Laporan	12 Laporan	30 Kali	30 Kali	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	76 %	50,000,000

					Keluarga/ UPPKS)		BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberd ayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)														
2	1 4	4	2. 02		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>							75,000,000	75,000,000								105,830,000
2	1 4	4	2. 02	1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberday aan dan Peningkata n Peran Serta Organisasi Kemasyara katan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	Jumlah Organisa si yang Mengiku ti Penguat an Kebijaka n Daerah dalam rangka Pemberd ayaan dan Peningka tan Peran Serta Organisa si Kemasya rakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembina an Ketahan an dan Kesejaht	Prosentase Peran aktif organisasi kemasyaraka tan dalam pembanguna n keluarga	Kab. Sukoharj o, Bendosa ri, Jombor	76 %	76 %	6 Orga nisasi	6 Orga nisasi	75 %	75 %	30,000,000	30,000,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	76 %	40,000,000

							eraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)														
2	1 4	4	2. 02	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Prosentase Peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	76 %	76 %	6 Organisasi	6 Organisasi	75 %	75 %	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	76 %	50,830,000

							Keluarga /UPPKS)															
2	1	4	2.	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Prosentase Peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	76 %	76 %	12 Laporan	12 Laporan	75 %	75 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	76 %	15,000,000	
<b>TOTAL</b>																<b>20,604,842,428</b>	<b>20,793,936,428</b>					<b>18,810,407,488</b>

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sukoharjo**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dan RPJMD Tahun 2021 -2026 terdapat 2 Tujuan dan 6 Sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

#### **3.2.1 Tujuan Renja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sukoharjo**

Tujuan Strategis Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sukoharjo dalam rencana Kerja Dinas PPKB dan PPPA Tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan strategis Renstra Dinas PPKB dan PPPA Tahun 2021-2026. Adapun Tujuan strategis Renja Dinas

PPKB dan PPPA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengendalian Penduduk.  
Indikator : Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan target 96,96.
2. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.  
Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan target 0,69.

#### **3.2.2 Sasaran Renja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sukoharjo**

Tujuan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sukoharjo didukung dengan upaya pencapaian sasaran. Adapun sasaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.  
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target 96,16.
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak.

Indikator :

- a. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, dengan target 1:10565
  - b. Rasio Kekerasan Terhadap Anak, dengan target 1:8596
3. Menurunnya angka kelahiran.

Indikator :

- a. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate / TFR*), dengan target 1,67.
  - b. Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun (*Age Spesifik Fertility Rate/ASFR*), dengan target 4,70.
4. Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP).

Indikator : Rata-Rata Usia Kawin Pertama, dengan target umur 22.

5. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan target 70,98.

## **BAB IV P E N U T U P**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-3, periode Renstra 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo dan mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman / acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program / kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan guna mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

Sukoharjo, 4 September 2023  
BUPATI SUKOHARJO

Ttd.

**ETIK SURYANI**